





MUNCULNYA **NASIONALISME ACEH:**


Dari Lahirnya GAM
Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)




BPNB
ACEH

 [bpnbaceh](https://www.instagram.com/bpnbaseh)

 [bpnb aceh](https://www.facebook.com/bpnbaseh)

 [bpnbaceh](https://www.youtube.com/bpnbaseh)

 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

ISBN 978-602-9457-98-8



9 786029 457988

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh - 23123.

☎ 0651-23226 | 📠 0651-23226 | ✉ bpnbaceh@kemdikbud.go.id

📷 [bpnbaceh](#) | 📺 [sobatbudaya](#) | 📺 [bpnbaceh](#) | 🌐 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/>



Seri Informasi Sejarah

No. 75/2020

**Munculnya Nasionalisme Aceh:
dari Lahirnya GAM sampai Operasi Nanggala
(1976-1982)**

**Oleh:
Hasbullah**

**Editor
Sanusi Ismail**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
TAHUN 2020**

**Munculnya Nasionalisme Aceh:
Dari Lahirnya GAM Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)
Hasbullah, S.S
iii + 26 hlm 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-9457-98-8**

Judul
Munculnya Nasionalisme Aceh:
Dari Lahirnya GAM Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)

Hasbullah

Copyrights ©2020 BPNB Aceh

Editor
Sanusi Ismail

Layout
Siti Nur Aida Fauziah

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks. : +62651 – 23226
http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh
email: bpnbbandaaceh@yahoo.com

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Seri Informasi Sejarah ini sehingga dapat diterbitkan. Seri Informasi Sejarah **Munculnya Nasionalisme Aceh: Dari Gerakan Aceh Merdeka Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)** ini mengisahkan proses munculnya nasionalisme kedaerahan di Aceh pada akhir 1976, yang berawal dari adanya perlawanan yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru sehingga upaya penumpasannya dilakukan melalui Operasi Nanggala hingga 1982.

Perlawanan sebagian rakyat Aceh pada pemerintah pusat ini penting diketahui oleh generasi muda untuk melihat proses terbentuknya konflik Aceh yang menewaskan 35.000 korban hingga 1998 sehingga episodenya perlu disusun dalam Seri Informasi Sejarah. Hal ini merupakan salah satu upaya BPNB Aceh untuk penyediaan narasi bagi pembelajaran sejarah lokal dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan mendokumentasikan aspek-aspek sejarah, yaitu peristiwa bersejarah di tingkat lokal yang terjadi pada masa lalu.

Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka di akhir 1976 yang dimulai bersamaan dengan pembangunan industri berskala besar, yang diawali penemuan ladang gas dan minyak bumi raksasa di utara Aceh, pembukaan HPH, dan HGU pada masa pemerintahan Orde Baru. Selain itu silang sengkabut pungutan *pajak nanggroe*, gangguan keamanan menjelang Pemilu 1977 oleh gerakan ini membuat stabilitas keamanan di pantai timur Aceh menjadi terganggu sehingga pemerintah menerapkan operasi militer dengan sandi Operasi Nanggala untuk mengejar para petinggi GAM yang terlibat sehingga dianggap tuntas dengan kaburnya para petinggi gerakan separatis ini ke luar negeri pada 1982.

Seri Informasi Sejarah ini bertujuan menarasikan kisah sejarah untuk memberikan pemahaman terhadap munculnya nasionalisme Aceh yang digerakkan oleh salah satu anggota keluarga pahlawan nasional sehingga hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah RI, dan generasi muda untuk dapat memahami proses integrasi Aceh ke NKRI, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Untuk itu, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Seri Informasi Sejarah ini. Semoga bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, 2020
Kepala BPNB Aceh

Irina Dewi Wanti, S.S., M.SP.
NIP 197105231996012001

PENGANTAR PENULIS

Segala peristiwa dari seluruh aktivitas manusia di masa lalu yang sudah terjadi dalam dimensi ruang dan waktu pasti meninggalkan jejak. Jejak peristiwa itu merupakan sumber sejarah. Sejarah adalah pembelajaran bagi manusia yang mau berinstrospeksi dan berpikir, karena setiap peristiwa yang terjadi menjadi pedoman untuk bertindak lebih bijak dan arif di hari ini, dan agar dapat terus melangkah ke masa yang lebih baik dan penuh keyakinan. Dengan demikian, sejarah menjadi kompas atau pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya dengan selamat.

Sejarah lokal memuat berbagai peristiwa yang terjadi di tingkat lokal dalam perjalanan waktu ke waktu. Tentu saja di setiap peristiwa bersejarah di daerah itu memiliki relevansi dengan nilai-nilai baik, dan untuk menghindari kesalahan sehingga menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi masyarakat pada hari ini untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Seri Informasi Sejarah ini mengungkapkan fakta tentang bagaimana terbentuknya nasionalisme kedaerahan, dan upaya penanggulangannya oleh pemerintah pusat (Orde Baru). Pada saat itu nasionalisme kedaerahan dibangkitkan oleh Teungku Hasan di Tiro, dan reaksi dari pemerintah adalah upaya penumpasan dengan Operasi Nanggala hingga para tokoh penggeraknya tercerai-berai ke luar negeri pada 1982.

Seri Informasi Sejarah ini dimaksudkan agar generasi muda arif dan bijak serta lebih objektif terhadap peristiwa sejarah lokal yang terjadi di masa lalu sehingga tidak menjadi sesat pikir ketika memahami proses dan episode dalam dinamika sejarah Aceh dari waktu ke waktu. Sejarah integrasi Aceh ke Indonesia pada awal kemerdekaan yang diwarnai berbagai dinamika juga terkait politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Untuk itu perlu kearifan dan kebijaksanaan seluruh elemen masyarakat Aceh agar dapat membawa Aceh menjadi lebih maju, lebih bermartabat, lebih kuat, dan lebih hebat dalam bingkai NKRI di periode selanjutnya.

Banda Aceh, November 2020
Penulis

Hasbullah, S.S.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BPNB ACEH	i
PENGANTAR PENULIS	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN.....	1
2. KONDISI ACEH MENJELANG PEMERINTAHAN ORDE BARU.....	3
3. ACEH PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU.....	6
4. MUNCULNYA NASIONALISME ACEH	10
5. GERAKAN ACEH MERDEKA DAN OPERASI NANGGALA	20
6. PENUTUP.....	24
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	25

1

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir 1949 Aceh telah menjadi 'daerah modal' Indonesia dalam mempertahankan republik. Namun, sejak awal tahun 1950-an Aceh sering justru digambarkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Pada 1953, Teungku Daud Beureueh telah memproklamasikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Aceh di bawah imam besar Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Sejak 1953 itu, pemberontakan telah muncul di Aceh dan dirasakan masyarakat sebagai akibat langsung dari kekecewaan dan rasa ketidak-adilan oleh para pemimpin dan masyarakat Aceh karena tindakan pusat. Peristiwa pemberontakan Darul Islam yang berlangsung selama delapan tahun itu banyak menelan korban, baik jiwa maupun harta.

Gerakan makar itu membawa sebuah bentuk otonomi bagi Aceh dengan diberlakukannya Aceh sebagai 'daerah istimewa' berbentuk otonomi luas yang secara bebas mengatur daerahnya, terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan ini tidak diberlakukan secara ideal. Status Aceh sebagai provinsi atau Daerah Tingkat I ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24/1956 tanggal 7 Desember 1956, melalui dinamika sejarah yang panjang sejak awal kemerdekaan sehingga menjadikan provinsi ini disebut 'daerah istimewa' pada 1959.¹

Pada akhir 1976, nasionalisme Aceh kembali dibangkitkan. Hal ini yang teraktualisasikan dalam pernyataan kemerdekaan dan kedaulatan Aceh yang terlepas dari Republik Indonesia. Pernyataan

¹M. Mas'ud Said, *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1999, hlm.76-77.

kemerdekaan yang sepihak itu terjadi pada 4 Desember 1976 dipimpin Teungku Hasan Tiro. Gerakan ini oleh pendirinya dinamakan *Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF)*. Namun, *ASNLF* kemudian lebih dikenal dengan 'Gerakan Aceh Merdeka' (GAM).

Pada awalnya gerakan separatis ini tidak didukung oleh semua tokoh Aceh. Bahkan, beberapa pentolan DI/TII Aceh 1953, ada yang menyebutkan bahwa gerakan ini sebagai pembohongan terhadap Teungku Daud Beureueh, dan rakyat Aceh untuk kesekian kalinya.² Teungku Hasan di Tiro sendiri pernah terlibat dalam DI/TII Aceh 1953, bahkan sempat diangkat sebagai 'duta besar' untuk PBB di Amerika Serikat.

GAM memanfaatkan isu kolonialisme Jawa-Indonesia terhadap sumber-sumber alam Aceh, untuk meraih simpati masyarakat Aceh. Munculnya GAM sebagai bentuk ekstrim perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat pada masa Orde Baru karena berbagai kebijakan terhadap Aceh. GAM saat itu memikul senjata dan mengibarkan bendera 'pembangkangan' untuk menuntut kemerdekaannya.

Lazimnya seperti rezim otoriter di seluruh belahan dunia, reaksi pemerintah bukan membuka ruang dialog, tetapi pengerahan pasukan militer ke Aceh. Operasi militer yang kemudian digelar oleh pemerintah pusat di Aceh sempat membuat GAM tercerai-berai sampai tahun 1982.

Dari akhir 1976 sampai 1982, GAM belum mendapat dukungan masyarakat secara luas. Selain itu, kekuatan tempurnya juga masih kalah dibandingkan dengan pergerakan DI/TII Aceh 1953, sehingga pada saat itu mereka hanya bisa menggalang pembentukan opini internasional, dan melakukan serangan sporadis terhadap pusat industri dan objek vital saja.

²Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992, hlm.377.

2

KONDISI ACEH MENJELANG PEMERINTAHAN ORDE BARU

1. Berakhirnya DI/TII Aceh

Aksi DI/TII Aceh yang dipimpin Teungku Daud Beureueh sejak 1953, awalnya tidak diselesaikan dengan dialog oleh pemerintah. Pemerintah pusat lebih memilih pendekatan militer sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan pertumpahan darah di Aceh. Delapan tahun kemudian konflik baru mereda, itupun setelah diadakan suatu dialog antara pemerintah pusat dengan Dewan Revolusi Aceh yang merupakan pengikut Tengku Daud Beureueh. Sementara itu, Teungku Daud Beureueh sendiri tidak menerima keputusan damai tersebut dan masih melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah tahun 1962.³

Misi pemerintah pusat waktu itu yang dikenal “Misi Hardi” yang diutus untuk melakukan dialog dengan wakil masyarakat atau yang disebut Dewan Revolusi Aceh mengadakan perundingan yang melelahkan selama dua hari dua malam. Pada malam kedua perundingan, Gubernur Ali Hasjmy menerima berita melalui telepon dari Bupati Aceh Besar, Zaini Bakri yang mengatakan bahwa Dewan Revolusi Aceh telah menerima usul-usul pemerintah pusat pada dini hari, 26 Mei 1959. Hasil kesepakatan dari perundingan tersebut disusun dalam suatu Surat Keputusan Pemerintah No.1/1959 yang melahirkan pengakuan otonomi khusus dan Daerah Istimewa Aceh. Di Aceh perundingan tersebut dikenal dengan “*Ikrar Lamteh*” di Aceh Besar.⁴

³M. Nur El Ibrahimy, *Peristiwa Kembalinya Tgk Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia*, Jakarta: M. Nur El Ibrahimy Press, 1982, hlm. 178.

⁴*Ibid.*

2. Permasalahan Otonomi Khusus “Daerah Istimewa”

Pemberian status otonomi khusus untuk Aceh dengan sebutan “Daerah Istimewa” pada 26 Mei 1959 merupakan tonggak sejarah dari pergolakan DI/TII Aceh melawan pemerintah sejak tahun 1953. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat, tercatat korban empat ribuan jiwa, harta, dan benda. Di samping itu, hancurnya sarana transportasi jalan dan jembatan, bahkan banyak perempuan menjadi janda, dan anak-anak menjadi yatim.

Beberapa tahun setelah itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1/1957, karena setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dilakukan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara diiringi dengan berlakunya sistem kabinet presidensial menyebabkan Kabinet Karya yang berkuasa dari 1957-1959 sebagai pembuat kebijakan itu dihapuskan pemerintah sehingga fenomena politik tersebut turut mempengaruhi jalannya status otonomi Aceh yang juga mengalami stagnansi.⁵

Pada tahun 1960, muncul pula Demokrasi Terpimpin yang diwarnai adanya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno dengan julukan “Pemimpin Besar Revolusi”. Pada masa ini, azas kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perkembangan politik yang demikian berdampak negatif terhadap perwujudan otonomi daerah seperti yang dimiliki Aceh.⁶

3. Berakhirnya Perlawanan Teungku Daud Beureueh

Teungku Daud Beureueh beserta pendukung setianya masih ada yang belum menerima keputusan pemerintah pusat dalam masalah penerapan otonomi khusus Aceh yang dinilai belum maksimal. Teungku Daud Beureueh kemudian membentuk Republik

⁵Hardi, *Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1993, hlm.180.

⁶*Ibid.*

Pemerintahan Islam (RPI) Aceh pada 1959 untuk melawan pemerintahan Soekarno atas perlakuan itu.⁷

Setelah hampir dua tahun berjalan RPI Aceh tidak membuahkan kepuasan yang membuat Teungku Daud Beureueh kembali memproklamasikan sebuah wadah perlawanan baru yang disebut dengan Republik Islam Aceh (RIA) pada 15 Agustus 1962. Namun, menyadari perjuangannya dalam pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh telah mengalami kegagalan, dan dia mulai ditinggalkan para pendukung setianya. Hal inilah yang mendorong Teungku Daud Beureueh kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Mei 1963, setelah berkali-kali diadakan perundingan secara dialogis dengan pihak pemerintah.

Pada saat itu pihak perunding pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Brigadir Jenderal M. Jassin, dan pihak Teungku Daud Beureueh telah berhasil mencapai kesepakatan yang membuat kondisi Aceh semakin membaik. Meskipun pada akhir 1965, PKI sempat bangkit di Aceh, namun karena tidak mendapat dukungan masyarakat sehingga segera dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Sejak saat itu, Aceh berhenti bergejolak dan kedamaian mulai dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Aceh.

⁷Tempo, "NII: Islam atau Negara Islam?", Jakarta: Edisi 28 Februari-5 Maret 2000, hlm.23.

3

ACEH PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

1. Munculnya DI/TII Baru, 1970-an

Orde Baru lahir sejak adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menyebabkan tumbangannya pemerintahan Orde Lama. Naiknya Presiden Soeharto ke tampuk pimpinan nasional, langsung membuat perubahan dalam tatanan politik yang tersentralistik dan militeristik.

Pada tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru telah mencium adanya gejala kebangkitan DI/TII Baru di beberapa daerah termasuk salah satunya Aceh. Gerakan perlawanan ini ditengarai juga terjangkit di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Aktor penggerak DI/TII Baru ini dikatakan pemerintah dilakukan oleh mantan anggota DI/TII Lama yang ikut ditransmigrasikan pemerintah ke daerah-daerah di Indonesia.

DI/TII Baru menjalar sampai ke Aceh yang digerakkan oleh simpatisan Teungku Hasan Tiro dan Teungku Daud Beureueh. Dalam beberapa kali pertemuan mereka di rumah Adah Jaelani di Jakarta, mereka telah merancang rencana untuk membangkitkan kembali semangat kebangkitan syariat Islam di Indonesia. Gerakan ini muncul karena simpati pada tokoh kharismatik Teungku Hasan Tiro dan gelora kemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Aceh.

Aksi-aksi tersebut menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah dengan munculnya perlawanan rakyat atau disebut dengan Front Pembebasan Muslim Indonesia (FPMI) atau kemudian dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁸

⁸Anhar Gonggong, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VII, Lahir dan Berkembangnya Orde Baru*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Dinas Sejarah Nasional dan Tradisional, 1993, hlm.157.

Kemunculan perlawanan ini telah membuat stabilitas keamanan di pantai timur, khususnya di bagian utara Aceh menjadi terganggu, dan pemerintah pusat mengklaim Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) sebagai 'dalang' dari aksi-aksi perlawanan masyarakat yang secara aktif telah melakukan berbagai teror menjelang Pemilu 1977. Gerakan ini kemudian dapat dipadamkan oleh militer secara serentak di seluruh Indonesia, dalam rangkaian operasi militer dengan sandi Operasi Nanggala.⁹

2. Perubahan Format Politik Pada Masa Orde Baru

Sejak tahun 1968, pemerintah Orde Baru telah menciptakan sebuah format politik di bawah kendali Presiden Soeharto yang kemudian menunjukkan kesuksesan luar biasa. Kunci kesuksesan format politik ini terletak pada pemantapan posisi dwifungsi ABRI dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, I menjadi sumber legitimasi utama peranan menentukan yang dimainkan militer dalam bidang politik. Sejalan dengan itu, integrasi dan konsolidasi militer (TNI/Polri) tampak berjalan dengan baik, berwujud dengan kemenangan Golkar sejak Pemilu 1971 di Indonesia. Sedangkan di Aceh, PPP masih memenangkan kontes Pemilu di daerah hingga pada tahun 1977 sehingga merupakan suatu hal yang unik, dan tentu saja mendapat perhatian ekstra dari pemerintah Orde Baru yang sedang meneguhkan kekuatan politiknya.

Penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia yang hanya menyisakan dua partai politik; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar) adalah sebagai upaya tersebut. Tujuan politik itu dilakukan pemerintah untuk melahirkan kestabilan politik di seluruh Indonesia.

Proses untuk melahirkan sebuah landasan politik baru militer (TNI/Polri) dan Golongan Karya, kemudian menjadi semakin kuat dan membentuk sebuah kekuasaan eksekutif di bawah desain Orde Baru sehingga kontrol hegemoni terhadap kekuasaan menjadi semakin efektif.

Perubahan dalam pemerintahan daerah dengan keluarnya Undang-Undang No.5/1974 tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan pemerintah di daerah sebagai perpanjangan tangan dari

⁹*Ibid.*

kekuasaan pemerintah pusat yang menyebabkan kedaulatan rakyat, semakin kabur. Di Aceh, perubahan ini tentu saja akan menghilangkan peran *gampong* dan *mukim* sebagai konsep politik dan sosial masyarakat Aceh yang kental, dan sudah berlangsung sejak sebelum masa kolonial. Undang-Undang Pemerintahan daerah ini dilahirkan dalam suatu tatanan politik yang diwarnai penerapan dan pendekatan militer dalam tatanan pemerintah Indonesia.¹⁰

Pendekatan militer (TNI/Polri) dalam perpolitikan dan penerapan kebijakan di daerah dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah, terutama meneguhkan peranan militer dalam kehidupan pemerintah dan sipil di daerah, sehingga kekuasaan menjadi tersentralistik dan Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1/1957 harus mengikuti pola-pola baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/1974, yang menyebabkan identitas otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi semakin tak jelas.

Ketentuan mengatur kedudukan antara kepala daerah dan DPRD sejajar posisinya menjadi tidak terwujud. Pada masa ini penerapan politik Orde Baru, di mana peranan Kepala Daerah jauh lebih menonjol dibandingkan peranan DPRD. Sedangkan dengan dasar prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD sebagai pengawas badan eksekutif daerah. Sebaliknya dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka DPRD adalah pengawas badan eksekutif daerah. Sebaliknya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1974, Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, seolah-olah kedudukan keduanya sama. Padahal kenyataannya, peran kepala daerah, jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan kedudukan DPRD, dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah yang baru tersebut.

Berdasarkan Pemikiran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5/1974, yang mencantumkan kepala daerah pada tingkat gubernur, bupati, atau walikota adalah penguasa tunggal sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan sehingga kekuasaannya adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

¹⁰*Op.cit.*

3. Keadaan Masyarakat Pada Awal Orde Baru

Pembangunan ekonomi Orde Baru diwarnai lahir dan berkembangnya pengusaha swasta non-pribumi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat secara finansial dengan pemberlakuan sistem Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebaliknya, pengusaha swasta daerah berkurang kemampuan daya saingnya, karena tidak memperoleh kemudahan tersebut.

Munculnya situasi ini karena kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik, sedangkan DPRD tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap model pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut. Ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi yang demikian, mengakibatkan munculnya kelompok pengusaha kapitalis atau konglomerat baru, sedangkan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan yang berarti.

Di samping itu, migrasi dan pertumbuhan penduduk sangat tinggi dan tidak merata di Aceh bagian utara, karena perkembangan pembangunan kawasan pertambangan dan industri setelah ditemukan lautan gas alam dan minyak bumi tahun 1970-an. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial di sana semakin kompleks. Ledakan penduduk serta meningkatnya angka pengangguran lokal, termasuk pengangguran kelompok intelektual yang tidak mendapat prioritas kerja dalam industri tersebut melahirkan kecemburuan sosial dan angka kriminalitas menjadi tinggi di daerah tersebut.

Terpusatnya sistem rekrutmen tenaga kerja dalam pembangunan dan meningkatnya berbagai kolusi, korupsi dan nepotisme membuat masyarakat lokal justru tidak mendapat kesempatan maksimal dalam memperoleh kesempatan kerja di daerah. Perkembangan dan pembangunan ekonomi telah membawa kesenjangan dan kecemburuan sehingga melahirkan gejolak dan konflik sosial. Konflik itu dapat berubah menjadi konflik kekerasan, seperti konflik antar suku, ras dan agama.¹¹ Hal ini kemudian terbukti di kawasan ini muncul gejolak sosial sejak tahun 1977 dan ditengarai dipelopori oleh kelompok GAM Teungku Hasan Tiro.

¹¹*Ibid.*

4

MUNCULNYA NASIONALISME ACEH

1. Lahirnya GAM Teungku Hasan di Tiro

Kehadiran industri berskala nasional dan internasional di Aceh bagian utara telah berubah tatanan ekonomi dan sosial masyarakat sejak tahun 1970-an. Pembangunan fisik belum memberikan keuntungan dan perubahan nyata dalam sektor kehidupan perekonomian masyarakat lokal, karena daerah yang disebut kota *'petro-dollar'* tersebut ternyata tidak memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakatnya.

Sebaliknya, kehadiran industri raksasa telah berdampak negatif dari adanya pencemaran udara dan limbah industri seperti terganggunya sistem irigasi pada pertanian masyarakat. Selain itu, petani tambak mengeluhkan adanya kerugian karena hasil panen dan kematian benur, begitu juga nasib yang sama dialami oleh petani padi di sana.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh pakar ekonomi menunjukkan tidak ada relevansi antara pertumbuhan industri dengan sektor lain bahkan dalam sektor industri itu sendiri. Adanya industri besar di Aceh bagian utara mestinya berhubungan antarsektor, namun ternyata tidak memberikan dampak berarti bagi pertumbuhan sektor lain khususnya pertanian yang merupakan mata pencarian sebagian besar penduduknya.

Kehadiran industri pupuk, yaitu Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Asean Aceh Fertilizer tidak memberikan kontribusi positif pada petani di sana, bahkan dengan ungkapan ekstrem, dikatakan keterkaitan industri pupuk dengan pertanian rakyat seperti terlepas atau tidak berketerkaitan sehingga keunggulan komparatif yang dimiliki daerah tersebut belum bermanfaat secara maksimal pada lingkungan sekitarnya.¹²

¹²Surat kabar, *Suara Pembaharuan*, rubrik "Tajuk Rencana", tanggal 16 Maret 1992.

Dalam bidang Pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Aceh, keberadaan Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam yang diresmikan Presiden Soekarno pada 2 September 1959, yang dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan tinggi di Aceh dengan memadukan sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam.

Namun, fenomena perguruan tinggi masa Orde Baru telah melahirkan intelektual elite atau meritokratis. Tidak dapat disangkal, sistem Pendidikan tinggi pada masa ini berada dalam tekanan terhadap civitas akademika, sehingga mahasiswa menjadi kurang memiliki kesadaran nasional dalam menyukseskan pembangunan di daerahnya.

Di samping itu, pengelolaan dan titik berat penjurusan Pendidikan di perguruan tinggi daerah cenderung tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah sehingga melahirkan lulusan pengangguran intelektual karena tidak mendapat posisi dalam dunia kerja yang terdapat di daerahnya. Hal ini merupakan permasalahan krusial yang memicu munculnya konflik karena adanya aktor-aktor intelektual dalam gerakan perlawanan.

Pertumbuhan industri dan perekonomian di Aceh bagian utara mengakibatkan perkembangan tata ruang perkotaan, pemukiman baru, serta berbagai sarana dan prasarana perkotaan seperti tempat hiburan dan rekreasi. Perkembangan tata kota merupakan suatu permasalahan karena berbaurnya berbagai budaya di Indonesia sehingga berbenturan dengan budaya lokal dan kecemburuan sosial.

Munculnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan akibat pertumbuhan ekonomi dan industri tidak dapat diterima masyarakat lokal dan mengklaim fasilitas-fasilitas tersebut merupakan tempat maksiat terselubung. Kefanatikan pada budaya membuat fasilitas-fasilitas baru milik pemerintah daerah dan para investor diganggu malah dirusak. Mereka juga berusaha menutup aset tersebut, namun upaya itu dihalangi pemerintah daerah dan pihak keamanan yang menjaga objek vital pembangunan tersebut.

Di samping itu pembukaan pemukiman transmigrasi yang telah dimulai sejak Orde Baru memantapkan posisinya sebagai upaya pemerataan pembangunan dan penduduk ke seluruh Indonesia merupakan persoalan lain. Selain itu, banyak masalah yang menyangkut pembebasan tanah rakyat atau tanah adat. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Aceh dengan Hak Guna Usaha (HGU), seperti karet dan kelapa sawit oleh pengusaha nasional dan pembukaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPI) untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Namun, faktanya masyarakat lokal merasa semakin termarjinalkan secara ekonomi, karena lahan adat yang diolah oleh mereka ikut diserobot pemerintah.

Perkembangan daerah Aceh dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan pesat di daerah pemukiman transmigrasi dan di sekitar perkebunan-perkebunan karet dan kelapa sawit di Aceh Timur, Aceh Barat dan Selatan, namun pembebasan tanah rakyat atau adat ternyata telah menjadi sentimen dan berbagai pertentangan dari masyarakat lokal.

Pada akhir 1976, Teungku Hasan Tiro kembali ke Aceh dari Amerika Serikat. Hal itu terjadi tidak begitu lama setelah 'dipecat' dari Kedutaan Besar DI/TII di PBB karena memprotes kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai penumpasan DI/TII di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjodjo dinilainya telah melanggar HAM, dalam kebijakan dengan menyetujui operasi militer terhadap penumpasan DI/TII di Indonesia.

Beberapa tahun kemudian, Teungku Hasan di Tiro pulang ke Aceh. Ia mendapat visa masuk ke Indonesia yang dikeluarkan kedutaan besar Indonesia untuk PBB pada saat itu dijabat Dr. Syarif Thaib, putra Aceh.

Di Aceh, kehadirannya mendapat sambutan hangat dari kerabat, intelektual, dan pengusaha di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, kehadirannya ke Aceh untuk melibatkan perusahaan "Dora" dalam eksploitasi gas dan minyak bumi di Aceh. Namun hal itu tidak ditanggapi oleh Pertamina dan pemerintah yang sudah mengikat kontrak dengan Exxon Mobil.

Berawal dari kekecewaan, keinginan untuk melawan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap orang Aceh membuat Teungku Hasan di Tiro berusaha untuk memperoleh simpati masyarakat. Mereka ada yang sepaham dengannya dalam menilai realitas sosial di Aceh tahun 1970-an, dan ada yang kontra terhadap ide-ide perlawanan tersebut.

Dalam beberapa pertemuan dengan simpatisannya, teungku Hasan di Tiro mempresentasikan kegemilangan Aceh dan kejayaan Aceh di masa lalu. Hal itu, untuk membangkitkan nasionalisme dan kesadaran sejarah untuk menentang rezim Orde Baru karena dinilai telah merusak cita-cita otonomi khusus, dan pelaksanaan syariat Islam

di Aceh, seperti yang ditetapkan pemerintah pusat pada pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 26 September 1959.

Tokoh-tokoh besar Aceh termasuk Teungku Daud Beureueh yang sangat berharap adanya perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dengan adanya pengakuan 'keistimewaan Aceh' juga pesimis melihat realitas sosial di Aceh pada masa itu. Otonomi khusus yang dimiliki oleh Aceh ternyata tidak pernah terwujud secara faktual sejak Orde Baru menduduki tampuk pemerintahan Indonesia.

Kekuasaan pemerintah saat itu semakin sentralistik mengakibatkan masyarakat Aceh merasa kehilangan 'keistimewaan' yang dimilikinya karena jasa-jasa Aceh yang besar pada masa revolusi kemerdekaan kepada Republik Indonesia.

Munculnya perlawanan baru, yang kemudian dikenal dengan 'GAM' adalah bukti nyata kekecewaan masyarakat Aceh. Pendeklarasian Gerakan ini dilakukan Teungku Hasan Tiro di Kabupaten Pidie pada 4 Desember 1976. Dasar penetapan tanggal tersebut juga sebagai momentum 'Hari Aceh Merdeka' yang memperingati Teungku Maat di Tiro sebagai penerus perjuangan Teungku Chik Tiro terakhir yang syahid ditembak Belanda di pedalaman Tiro, Pidie pada 3 Desember 1911.

Lahirnya perlawanan GAM ini disebutkan sebagai lanjutan dari perjuangan Teungku Daud Beureueh dalam upaya menegakkan Syariat Islam. Namun bedanya Teungku Hasan di Tiro secara jelas menyebutkan gerakannya merupakan upaya pembebasan diri dari NKRI.¹³

2. Ketegangan Menjelang Pemilu 1977

Dengan adanya aktivitas 'GAM' di Pidie sejak akhir 1976, stabilitas politik dan keamanan di Aceh bagian utara terganggu dan menghambat pembangunan yang dilakukan Orde Baru. Di samping itu, pemerintah pusat sedang memberangus semua gerakan radikal di Indonesia. Hal itu menyebabkan pemerintah dan militer sebagai penguasa tunggal memunculkan stigma GAM sebagai kelompok subversif yang merongrong kedaulatan nasional. Hal yang sama juga kepada GAM juga diungkapkan oleh Syamaun Gaharu dari barisan nasional dan tokoh DI/TII Aceh 1953 menyebutkan, GAM sebagai

¹³*Ibid.*

barisan sakit hati sehingga gerakannya harus diselesaikan dengan bijak oleh pemerintah RI.

Beberapa bulan menjelang Pemilu 1977, GAM dicurigai oleh pemerintah Orde Baru akan melakukan makar terhadap pemerintah RI. Hal ini kontroversial karena yang dilakukan Teungku Hasan Tiro sangat bertolak belakang dengan kekuatan nyata GAM di lapangan saat itu. Kekuatan pasukan dan perlengkapan persenjataan GAM tidak sebanding dengan kekuatan DI/TII Aceh 1953 yang digerakkan Teungku Daud Beureueh apalagi dibandingkan dengan kekuatan Kodam Iskandar Muda sehingga gerakannya ini tidak begitu populer saat itu di Aceh.

GAM hanya memiliki lima pucuk senjata dan seperangkat peralatan gerilya yang dibawa oleh Teungku Hasan Tiro dari Amerika Serikat. Hal ini membuat sebuah pertanyaan besar untuk memaknai gerakan makarnya. Pada awalnya GAM tidak memiliki kekuatan dan hanya melakukan perang opini dalam masyarakat, khususnya di pedesaan dan hanya sebatas melakukan sosialisasi organisasinya sampai menjelang April 1977.

Para pengikut dan simpatisannya pada saat itu hanya melakukan serangkaian pertemuan untuk memobilisasi massa. Munculnya aktivitas GAM Teungku Hasan Tiro menjelang Pemilu 1977 beranansir bahwa adanya keinginan pemerintah dan militer untuk menekan ulama lokal dan simpatisan partai politik PPP di daerah itu karena mayoritas suara dalam Pemilu sebelumnya ada di pantai timur di bagian utara Aceh, yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur yang selalu dimenangkan partai Islam seperti PPP, dan hal itu terbukti lagi pada Pemilu 1977. Namun setelah itu, PPP oleh Golkar sudah dapat dikalahkan pada Pemilu setelah 1982.

Pada masa Orde Baru, militer adalah representasi pemerintah dalam segala aktivitas politik termasuk di daerah, terutama untuk memenangkan Golongan Karya sebagai jalan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru atas sipil. PPP berhasil dikalahkan Golongan Karya di Aceh setelah penerapan dan pendekatan militer dalam rangka menangani masalah separatis GAM.

Ajakan untuk mendukung dan membantu kelompok GAM telah dilakukan oleh pengikut Teungku Daud Beureueh pada 15-18 Februari 1977 di Beureunun Aceh Pidie. Kemudian oleh Teungku Amri Nafi pada 22 Februari 1977 di Matangkuli Aceh Utara. Selanjutnya oleh Teungku Muhammad Taher Husen di Simpang Tiga, Pidie, pada April

1977. Ceramah umum dari ulama tradisional dan diikuti massa dari simpatisan PPP, seringkali ditengarai sebagai rapat massal GAM.

Militer dalam sistem politik Orde Baru dipakai untuk memberangus kekuatan-kekuatan sipil lokal, terutama peran ulama lokal sehingga menjadikan Aceh sebagai daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini memunculkan pertentangan antara pemerintah dengan ulama lokal atau tradisional. Tekanan yang semakin kuat dari pemerintah dan militer membuat aktivitas GAM Teungku Hasan Tiro sempat stagnan sejak pertengahan tahun 1977.¹⁴

Teungku Hasan di Tiro membiarkan simpatisannya berbaaur dengan masyarakat pelosok dan pedalaman bagian utara Aceh untuk membentuk opini dan menarik simpati masyarakat. Dengan strategi dan aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh pengikut dan panglima-panglima wilayah (*Panglima Sagoe*) untuk menghadapi Tindakan represif militer.¹⁵

Wilayah operasi Gerakan Teungku Hasan di Tiro hanya terbatas di tiga kabupaten yang sangat padat penduduknya di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Daerah Kabupaten dan Kotamadya lainnya belum terpengaruh oleh GAM sama sekali, kecuali ekkses-ekkses dari ketiga kabupaten tersebut.

Aksi-aksi politik kelompok ini mulai diraskan oleh masyarakat menjelang Pemilu pada April 1977. Saat itu terjadi beberapa kali penaikan bendera GAM di Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh Timur. Di samping itu, juga ada penempelan brosur atau leaflet yang berisi ajakan agar masyarakat melawan pemerintah RI berisi kutipan resolusi-resolusi PBB tahun 1960 dan 1970 tentang hak bangsa dijajah untuk merdeka. Selain itu, berisi sejarah kegemilangan keluarga besar Teungku Chik di Tiro. Brosur-brosur itu dicetak menggunakan bahasa Aceh dan Inggris untuk kepentingan lokal dan internasional.

Pada 26 Januari 1978, GAM pernah mempergunakan media radio untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan mereka di pedalaman Tiro, Pidie. Program acaranya menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Aceh, Indonesia, dan Inggris. Radio tersebut sempat mengudara selama beberapa bulan saja.¹⁶

¹⁴Al Chaidar, *Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999).

¹⁵*Ibid.*

¹⁶M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), hlm. 30.

Teungku Hasan di Tiro sebagai Wali Negara Aceh melakukan pertemuan selama tiga minggu dengan bawahannya, sejak 20 September 1977. Pertemuan itu diikuti 50 orang petinggi GAM yang membahas permasalahan internasional, politik, pemerintahan, ekonomi, dan strategi pembebasan bangsa.¹⁷ Ia bersama pengikutnya melakukan gerilya dan berkali-kali memindahkan perkemahannya menghindari serangan ofensif dari militer RI. Pengawal pribadinya Keuchik Umar dan Pawang Rasyid sangat memahami seluk-beluk pedalaman Tiro hingga Tangse, Pidie.

Setiap sergapan militer berhasil mereka hindari. Kesatuan militer GAM yang beroperasi di wilayah-wilayah juga menghadapi serangan ofensif militer. Strategi gerilya membuat mereka selalu mendapat bahan logistik dari masyarakat yang dilalui pasukan sekaligus untuk menguasai medan.

Militer RI melakukan pengejaran dan membuat membuat pos-pos komando, namun keberhasilan koordinator antara wilayah GAM Daud Husen alias Daud Paneuk sebagai Komandan Pasukan Komando masih berfungsi dan mampu mengunjungi antar-sektor untuk memotivasi para komandan wilayah sehingga informasi GAM masih dapat berjalan di tengah ketatnya tekanan dari militer. Pengadangan terhadap pasukan militer yang melakukan Operasi Nanggala terus dilakukan.

Selain itu, GAM melakukan tekanan terhadap orang-orang yang menghalangi gerakan. Seperti yang terjadi terhadap Hasan Saleh, pejuang kemerdekaan RI dan tokoh DI/TII Aceh 1953 pada 16 Januari 1978 di Meutareum Pidie. Peristiwa itu menyebabkan ia terluka dan dua orang lainnya tewas diberondong peluru GAM.

Menjelang Pemilu 1977, Teungku Muhammad Nurdin Ketua Cabang PPP dipanggil oleh Teungku Daud Beureueh dan memerintahkannya untuk bergabung dengan GAM pimpinan Teungku Hasan di Tiro. Namun, Teungku Nurdin melaporkan kejadian itu pada pemerintah dan TNI Kabupaten Pidie, yaitu Komandan Kodim Ali Husen. Pemerintah menganggapnya terlalu ikut campur dalam urusan GAM. Pihak GAM juga menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa Aceh atau *cuak* dan akhirnya ia di penjara di Sigli, Pidie.

GAM saat itu melakukan teror di beberapa tempat di wilayah Aceh Utara menyebabkan terbunuhnya seorang warga negara Amerika

¹⁷Hasan di Tiro, *The Price of Freedom* (The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro, NLFAS, 1984), hlm.108-110.

Serikat yang bekerja di perusahaan minyak di Lhoksukon dan seorang warga negara Cina di Pante Raja. Masalah ini dipicu oleh keinginan pihak GAM yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi di Aceh membayar '*pajak nanggroe*'.¹⁸

3. Masalah Dana Pergerakan dan *Pajak Nanggroe*

Ketiadaan dan kekurangan dana menjadi kendala utama yang dialami GAM dalam pergerakannya di Aceh. Masalah ini dikatakan oleh Abdul Wahab Umar Tiro dan Ilyas Cot Plieng dalam sidang perkara kasus GAM. Mereka menyebutkan Teungku Hasan Tiro ketika kembali ke Aceh dari Amerika Serikat pada akhir 1976, hanya membawa 5 pucuk senjata dan seperangkat alat gerilya. Dana pergerakan ini selama bergerilya diperoleh dari simpatisan dan kerabatnya termasuk Teungku daud Beureueh.¹⁹

Upaya pencarian dana untuk perjuangan GAM dilakukan dengan mengenakan *pajak nanggroe* pada setiap perusahaan yang beroperasi 'di wilayah kekuasaannya'. Untuk itu, para pengusaha pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada pemegang Sistem Penanaman Modal Daerah (SPMD), baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing sebagai imbalan pihak GAM melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan peraturan untuk membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pungutan lainnya dari pemerintah RI.²⁰

Adanya peraturan pajak nanggroe yang ditetapkan pihak GAM menimbulkan permasalahan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terikat kontrak dengan pemerintah RI. Berbagai permasalahan tersebut terlihat dengan adanya beberapa tagihan *pajak nanggroe* dari GAM yang tidak dipenuhi oleh beberapa perusahaan di Aceh sehingga berakibat jatuhnya korban jiwa warga asing seperti yang terjadi pada 31 Juli dan 22 Agustus 1977.

Pihak GAM mengirimkan 4 pucuk surat berbahasa Aceh, Indonesia, dan Inggris ditujukan kepada perusahaan Bechtel, LNG Aron, Surat tersebut ditandatangani Kepala Kantor Urusan Pajak

¹⁸Hasan Saleh, *op.cit.*, hlm. 384-394.

¹⁹Himpunan Surat Tertuduh Abdul Wahab Umar Tiro dan Usman Lampoh Awe, Menteri Keuangan GAM.

²⁰Surat Keputusan Menteri Kehakiman GAM. Tgk. Ilyas Leube No.1/1977 tanggal 10 September 1977.

Dalam negeri GAM Uzair Jailani dan Muhammad Yusuf Komandan Militer GAM wilayah Pase. Saat itu GAM membebaskan pajak semester pertama tahun 1977 sebesar 150.000,- dollar AS yang harus dilunasi pada tanggal 27 Agustus 1977.²¹

Pihak perusahaan merasa terancam dan keberatan dengan permintaan tersebut sehingga melaporkan pada pemerintah dan militer RI. Akibatnya pada 29 November 1977, sepuluh orang gerilyawan GAM menghadang para pekerja perusahaan Bechtel, Aron. Akibat kejadian itu dua warga Amerika Serikat, George Parucome tewas dan Donald Stayer luka berat ditembak GAM.²²

Peristiwa selanjutnya terjadi pada perusahaan pemegang HPH, PT Seulawah milik warga negara Malaysia keturunan Cina yang beroperasi di hutan Paru, Pidie. Pada 3-4 Juli 1977, Menteri Urusan Pajak 'GAM' mengirim dua pucuk surat kepada perusahaan tersebut berisi tagihan semester pertama tahun 1977 sebesar 300.000,- dollar AS dalam pembayaran 3 hari setelah surat diterima.

Pihak perusahaan melaporkan kepada Kolonel Nyak Umar, Komandan Kodim Pidie. Perusahaan itu menolak membayar '*pajak nanggroe*' sehingga tanggal 12 Desember 1977, pihak GAM melakukan pengadangan terhadap pekerja perusahaan tersebut saat beroperasi di hutan.

Peristiwa penyerangan oleh GAM itu menewaskan Leong Yew Thong, warga negara Malaysia yang ditembak oleh GAM. Sejumlah peralatan dan alat berat perusahaan tersebut mengalami kerusakan berat, setelah dibakar.²³

Teungku Hasan di Tiro kemudian menugaskan Menteri Keuangan GAM, Muhammad Usman Lampoh Awe agar 'turun gunung' untuk perjalanan tugas ke Medan, Sumatera Utara untuk mencari logistik. Namun, pihak militer berhasil menangkapnya dan kemudian dipenjarakan.

Pada tanggal 16 Maret 1979, Teungku Hasan di Tiro mengirimkan lagi sebuah surat kepada pimpinan perusahaan Bechtel proyek LNG Aron. Surat berbahasa Inggris tersebut ditandatangani oleh Sulaiman Ibrahim, Kepala Urusan Dalam Negeri GAM, yang

²¹Surat Kepala Urusan Pajak Dalam Negara Sumatera, tanggal 31 Juli 1977 dan Surat *Commander, Pasay Province, The Army Acheh State of Acheh*.

²²M. Isa Sulaiman. *op.cit.*

²³*Ibid.*

berisi tagihan *pajak nanggroe* sebesar 300.000.- dollar AS. Perusahaan itu diminta melunasinya dalam waktu hingga 31 Maret 1979, melalui Rekening No. 151553.4. *Swiss Bank Corporation, 2 Rue de la Confederation, Geneva. Swizerland.* Pajak itu rencananya akan digunakan untuk mendanai gerakan, dan membeli peralatan perang.²⁴

²⁴Surat *Director Internal revenue Servise State of Sumatera.* March 1978.

5

GERAKAN ACEH MERDEKA DAN OPERASI NANGGALA

1. Reaksi Pemerintah Daerah Aceh

Aktivitas pengikut Teungku Hasan di Tiro mendapat reaksi keras dari pemerintah daerah dan militer karena telah merisaukan gangguan keamanan menjelang perhelatan demokrasi menjelang Pemilu 1977. Gubernur Aceh, Muzakkir Walad dan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, R.A. Saleh mengeluarkan seruan berisi himbauan agar masyarakat tidak terbujuk, dan mewaspadaai GAM.²⁵

Selain itu, MUI Aceh membentuk tim yang diketuai Teungku Abdullah Ujong Rimba. MUI Aceh mengeluarkan seruan kepada seluruh masyarakat, berisi imbauan yang menyebutkan bahwa kaum muslimin Aceh adalah bagian dari NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan berharap masyarakat agar menjauhkan diri dari semua pemikiran, ucapan, dan perbuatan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional.²⁶

Gubernur Aceh membentuk tim penerangan yang terdiri yang terdiri dari personil Kodam Iskandar Muda, Kanwil Departemen Agama, Departemen Penerangan, dan MUI Aceh. Mereka diturunkan ke kampung-kampung untuk di Aceh bagian utara untuk membendung proganda GAM terhadap masyarakat.

Bupati Pidie, Sayed Azhari dan Komandan Komando Distrik Militer Letnan Kolonel Nyak Umar pada 5 Mei 1977 mengeluarkan seruan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh atau mengikuti Gerakan inkonstitusional yang digerakkan Teungku Hasan di Tiro.

²⁵Pernyataan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.6/SKR/1977, (Hasan Basri, S.H., PLH. Gubernur), 22 Januari 1979.

²⁶Seruan Ketua MUI Aceh No.410/MU/VI/1977, 3 Juni 1977.

Keadaan politik di Kabupaten Pidie dan Aceh bagian utara yang demikian membuat masyarakat menjadi tidak aman.

PPP sebagai pemenang Pemilu 1977 mengeluarkan sebuah instruksi kepada seluruh pimpinan cabang di seluruh Aceh agar tidak terpengaruh oleh GAM karena dianggap sebagai gerakan separatis yang mengacaukan keamanan dan ketertiban. Hal itu dilakukan karena ada anggapan bahwa para aktivis PPP telah didekati oleh pihak GAM, seperti yang dituduhkan kepada Teungku Nurdin Amin, ketua DPC PPP Kabupaten Pidie. Padahal yang terjadi sebaliknya, ia tidak mau bergabung dengan GAM dan kemudian melapor pada Dandim Pidie, tetapi ia malah ditangkap karena dicurigai sehingga dipenjara.²⁷

2. Jalannya Operasi Nanggala

Setelah dilakukan operasi intelijen, aparat keamanan telah mengetahui aktivitas GAM menjelang Pemilu 1977. Pada saat itu pihak militer langsung melakukan pengejaran dan penumpasan terhadap pengikut atau simpatisan GAM.²⁸

Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap GAM saat itu langsung disikapi pemerintah daerah dengan keras karena meresahkan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Respon pemerintah saat itu menggelar operasi militer dengan sandi Operasi Nanggala yang ditugaskan untuk menumpas aktivitas GAM dan beberapa Gerakan sejenis di Indonesia sejak akhir 1977.

Operasi militer Nanggala yang dilakukan berupa blokade terhadap jalur logistik GAM yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Pada saat operasi digelar, banyak masyarakat yang ditangkap karena dianggap terlibat dalam berbagai aktivitas GAM, seperti penyebaran brosur pamflet, penaikan bendera GAM, pemberian dana atau sumbangan, dan bantuan logistik kepada GAM. Mereka yang dicurigai dihimbau untuk menyerahkan diri dan langsung ditangkap dan ditahan pada akhir 1977.²⁹

²⁷Hasil Pemilu 1977, PPP keluar sebagai peraih suara terbanyak untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

²⁸Pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Aceh (Muhammad Hasan Basri, S.H., PLH Gubernur No.6/SKR/1977). Pada saat itu sandi operasinya disebut bernama Operasi Nanggala.

²⁹M. Isa Sulaiman, *op.cit.*

Tekanan yang semakin keras dari militer dalam Operasi Nanggala dan juga dari pemerintah serta ketidakseimbangan kekuatan persenjataan yang dimiliki dengan TNI/Polri menyebabkan Teungku Hasan di Tiro terpaksa bertolak ke luar negeri meninggalkan Aceh. Ia meninggalkan Aceh melalui pantai Jeunib Kabupaten Aceh Utara, dan selanjutnya menuju ke Singapura.

Setelah bertemu dengan Malik Mahmud al Haytar, pengawal pribadinya seperti Daud Husen dan kawan-kawan kembali ke Aceh. Mereka melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah dengan beberapa petinggi GAM lainnya yang masih bergerilya di pegunungan di wilayah pantai timur Aceh.

Operasi Nanggala terus digelar sampai menjelang bulan Ramadan atau Puasa tahun 1978 dengan bantuan MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh. MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan sebuah seruan pada 21 Juli 1978, yang menyerukan kepada mereka yang terlibat GAM agar kembali melaksanakan ibadah puasa dan membangun bersama-sama masyarakat dan tidak akan ditangkap atau ditahan.³⁰

Anggota GAM yang turun gunung atau menyerah karena seruan ini pada saat itu ditangkap oleh pihak militer dan kemudian dipenjara. Hal inilah yang mengakibatkan peran ulama sebagai mediator konflik, menjadi tercoreng dan tidak mendapat tempat lagi di hati GAM.³¹

3. Pengejaran Petinggi GAM Hingga Kembali ke Luar Negeri

Pengejaran terhadap para tokoh dan aktivis GAM masih terus dilakukan dengan Operasi Nanggala terus dilakukan oleh pihak Kodam Iskandar Muda. Pada 1981, Pangdam Iskandar Muda, Brigadir Jenderal Joni A. Rahman berusaha menuntaskan perlawanan GAM yang masih bertahan di pelosok-pelosok,

Saat itu, dibentuk dua buah tim atau satuan tugas yang akan beroperasi di wilayah utara Aceh untuk mengejar para aktivis GAM yang masih bergerilya di hutan-hutan. Tim operasi dipimpin Mayor (Infanteri) Jakdi Husein menggelar penyisiran untuk menangkap

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

beberapa petinggi GAM pada 15 April 1982. Satuan Tugas A berhasil menembak Teungku Ilyas Leube dan Teungku Idris Ahmad (Gubernur GAM Wilayah Pase) bersama Yakob Piah di pedalaman Jeunib, Kabupaten Aceh Utara (kini Kabupaten Bireun). Sedangkan Satuan Tugas B yang dipimpin Kapten Waito, pada 2 Mei 1982 memaksa Idris Mahmud bersama tiga kerabatnya menyerahkan diri pada militer karena ada keterkaitan hubungan persaudaraan dengan Zubir Mahmud, Gubernur GAM wilayah Perlak, di Idi Kabupaten Aceh Timur.³²

Dalam keadaan genting itu, petinggi GAM yang tersisa di hutan-hutan berusaha meloloskan diri ke luar negeri. Pada Juni 1981, Zaini Abdullah beserta tiga pengawalnya meloloskan diri ke luar negeri melalui Medan, Sumatera Utara. Setahun kemudian, disusul oleh Husen Daud juga berhasil meloloskan diri ke luar negeri. Mereka semua bergabung dengan Teungku Hasan di Tiro di Swedia. Sebagian tokoh GAM lainnya menetap di Malaysia.

Pada pertengahan 1982, sudah tidak ada petinggi GAM yang memimpin perlawanan di Aceh. Lolosnya para petinggi GAM ke luar negeri mendapat perhatian serius dari pihak militer. Akhirnya diketahui 'dalang' lolosnya para petinggi GAM itu adalah Hasbi Abdullah saudara kandung Zaini Abdullah. Hasbi Abdullah dan Mulkan Usman akhirnya ditangkap di Medan, Sumatera Utara dan ditahan sejak Maret 1983 dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan penjara.³³

Dengan berhasilnya pihak militer menumpas GAM dari 1977-1982 dalam Operasi Nanggala menyebabkan tidak ada lagi petinggi GAM yang tinggal di Aceh. Bahkan, para tokoh tua yang dianggap masih membahayakan kestabilan politik Orde Baru dan stabilitas keamanan, seperti Teungku Daud Beureueh 'dibawa' pemerintah ke Jakarta hingga usia senja baru dikembalikan lagi ke tanah kelahirannya di Beureunun, Pidie.³⁴ Kondisi keamanan dan stabilitas masyarakat Aceh mulai kondusif setelah hengkangnya para petinggi GAM dan berjalannya kontrol hegemoni Orde Baru yang dikenal tersentralistik.

³²Waspada, Medan, 20 April 1982.

³³Himpunan surat berkas perkara Drs, Hasbi Abdullah, No.61/Pid.B./1983/PN-BNA, tanggal 30 Desember 1983.

³⁴Hasan Saleh, *op.cit.*

6

PENUTUP

Munculnya gerakan separatisme di Aceh sejak Teungku Hasan di Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 3 Desember 1976 telah melahirkan konflik awal di Aceh akibat dari pembangunan pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sentralistik dan tidak menampung aspirasi tokoh Aceh yang saat itu menilai pembangunan yang dijalankan Orde Baru tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Aceh.

Di lain sisi, kontrol hegemoni Orde Baru dalam Pemilu 1977 sudah mulai dijalankan dan ternyata di Aceh PPP masih mendominasi dan Golkar sebagai partai pemerintah dipermalukan di Provinsi ini. Memang secara nasional tidak signifikan, tetapi secara marwah Aceh memang beda dengan provinsi lain yang sudah berhasil dikendalikan oleh control politik Orde Baru. Hal ini yang membuat konflik awal antara GAM dengan Orde Baru ini menjadi berwarna karena mendapat perhatian lebih dari militer dan pemerintah pusat karena latar belakang sejarah perlawanan Aceh dengan Orde Lama sejak DI/TII Aceh 1953.

Secara keamanan, operasi penumpasan GAM pada periode awal ini berhasil membuat Aceh kondusif membuat GAM tercerai-berai hingga 1982 dengan hengkangnya tokoh-tokoh GAM ke luar negeri, tetapi efek sosial budayanya kemudian semakin sengkarut dalam periode selanjutnya akibat dari kesalahan penanganan konflik ini yang lebih mengedepankan pendekatan militer dan mengenyampingkan dialog. Akibatnya, justru lebih berbahaya lagi di kemudian hari karena kebijakan yang sangat sentralistik dan militeristik ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anhar Gonggong, dkk, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VII, Labir dan Berkembangnya Orde Baru*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Dinas Sejarah Nasional dan Tradisional.
- Al Chaidar, 1999, *Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Menujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press.
- Hasan di Tiro, 1994, *The Price of Freedom, The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro*, NLFAS.
- Hardi, 1993, *Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- M. Isa Sulaiman, 2000, *Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- M. Nur El Ibrahimy, 1982, *Peristiwa Kembalinya Tgk Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia*, Jakarta: M. Nur El Ibrahimy Press.
- M. Mas'ud Said, 1999, *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*, Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Hasan Saleh, 1992, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Surat Kabar dan Majalah:
Tempo, "NII: Islam atau Negara Islam?", Jakarta: Edisi 28 Februari-5 Maret 2000.
- Suara Pembaharuan*, dalam rubrik "Tajuk Rencana", 16 Maret 1992.
- Waspada, Medan, 20 April 1982

Arsip:

Himpunan surat tertuduh Abdul Wahab Umar Tiro dan Usman Lampoh Awe, Menteri Keuangan GAM.

Himpunan surat berkas perkara Drs. Hasbi Abdullah, No.61/Pid.B./1983/PN-BNA, tanggal 30 Desember 1983.

Pernyataan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.6/SKR/1977, (Hasan Basri, S.H., PLH. Gubernur), 22 Januari 1979.

Seruan Ketua MUI Aceh No.410/MU/VI/1977, 3 Juni 1977.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman GAM, Tgk. Ilyas Leube No.1/1977 tanggal 10 September 1977.

Surat Kepala Urusan Pajak Dalam Negara Sumatera, tanggal 31 Juli 1977 dan Surat *Commander, Pasay Province, The Army Acheh State of Acheh*.

Surat *Director Internal Revenue Service State of Sumatera. March 1978.*

